IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN : A SYSTEMATIC LITERATUR RIVIEW

Ella Febriyanti[1], Siti Roisah[2], Nurul Aini[3], Yantoro[4], Ali Idrus[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Jambi*
E-mail : [1]ellafebri2402@gmail.com, [2]sitiroisah6141@gmail.com,[3]nurulaini092000@gmail.com, [4]yantoro@unja.ac.id, [5]ali.idrus@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of School-Based Management (SBM) in educational financing, identify the principles of educational financial management, examine the implementation of SBM in school financial management, and analyze its impact on improving educational quality. This research employed a Systematic Literature Review (SLR) using a qualitative descriptive approach. Data were collected from various sources, including national and international journals, books, policy documents, and educational reports published between 2020 and 2026. Literature searches were conducted through Google Scholar, Garuda, ERIC, and Scopus databases, and the data were analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that the implementation of SBM in educational financing contributes to improving budget efficiency, transparency, accountability, and stakeholder participation in decision-making processes. In addition, SBM provides schools with greater flexibility in determining program priorities based on their specific needs, thereby supporting the improvement of educational services and school performance. However, its implementation still faces several challenges, including limited managerial competence of school principals, disparities in resources, and inadequate financial supervision systems. Therefore, strengthening human resource capacity, improving monitoring mechanisms, and fostering sustainable collaboration among schools, governments, and communities are essential to achieving effective and sustainable educational financial management.

Keywords : *School-Based Management, Educational Financing, Transparency, Accountability, Educational*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pembiayaan pendidikan, mengidentifikasi prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan, mengkaji implementasi MBS dalam pengelolaan keuangan sekolah, serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa jurnal nasional dan internasional, buku, dokumen kebijakan, serta laporan pendidikan yang relevan dan diterbitkan pada periode 2020–2026. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Garuda, ERIC, dan Scopus, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Selain itu, MBS memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menentukan prioritas program sesuai kebutuhan sehingga mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi manajerial kepala sekolah, ketimpangan sumber daya, dan belum optimalnya sistem pengawasan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan sistem pengawasan, dan kolaborasi yang berkelanjutan antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Manajemen Berbasis Sekolah, Pembiayaan Pendidikan, Transparansi, Mutu Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan, serta peningkatan mutu layanan sekolah. Fattah (2020) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, UNESCO (2021) menegaskan bahwa tata kelola pembiayaan pendidikan yang baik merupakan faktor penting dalam menjamin akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan.

Dalam era desentralisasi pendidikan, pengelolaan pembiayaan tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu bentuk desentralisasi pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Menurut Mulyasa (2021), MBS merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai stakeholder, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Hasil penelitian Gusnardi, Riadi, dan Hendripides (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap lembaga pendidikan. Selain itu, penelitian Simamora (2022) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sekolah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pendidikan dan mendukung pencapaian tujuan sekolah.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Husnidar, Khairuddin, dan Bahrun (2024) menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang baik memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan efektivitas program sekolah (Zaini, 2025).

Meskipun demikian, implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan kapasitas manajerial kepala sekolah, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi kendala yang sering ditemukan dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, atau efektivitas pembiayaan pendidikan, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa terbatasnya kajian yang mengintegrasikan konsep, prinsip, implementasi, tantangan, dan dampak Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Kajian Teori

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Konsep MBS berkembang sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada pihak yang paling memahami kebutuhan sekolah, yaitu warga sekolah dan stakeholder terkait. Melalui MBS, sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai program pendidikan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki. Menurut Mulyasa (2021), Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya pendidikan secara mandiri dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini menempatkan sekolah sebagai pusat pengelolaan pendidikan sehingga berbagai kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah.

Penerapan MBS bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian Sinaga (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip MBS, seperti otonomi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian Radiansyah (2026) menunjukkan bahwa implementasi MBS memiliki hubungan positif dengan peningkatan mutu lulusan melalui penguatan peran kepala sekolah dan pengelolaan sumber daya sekolah yang lebih efektif.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan melalui penerapan prinsip otonomi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas guna meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Mulyasa (2021), terdapat beberapa karakteristik utama dalam Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu otonomi sekolah, partisipasi stakeholder, transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, dan orientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

1. Otonomi sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas program sesuai kebutuhan sekolah.
2. Partisipasi stakeholder diwujudkan melalui keterlibatan guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi mengenai program dan penggunaan anggaran kepada stakeholder.
4. Akuntabilitas merupakan kemampuan sekolah dalam mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan.
5. Karakteristik lainnya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, manajer, administrator, dan supervisor yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh sumber daya sekolah.

6. Selain itu, seluruh aktivitas dalam MBS diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam tata kelola sekolah yang baik dan berpengaruh terhadap efektivitas program pendidikan

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan karena seluruh proses pendidikan memerlukan dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Ketersediaan dan pengelolaan pembiayaan yang baik akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai aspek administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Menurut Fattah (2020), pembiayaan pendidikan merupakan seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pembiayaan pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana pendidikan. Sementara itu, Ferdi (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas individu dan pembangunan ekonomi masyarakat. UNESCO menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan instrumen penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan keberlanjutan pembangunan pendidikan. Selain itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi agar dana pendidikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik dan lembaga pendidikan.

Dalam konteks sekolah, pembiayaan pendidikan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan yang efektif akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap sekolah. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan keuangan dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan dan menurunkan efektivitas program sekolah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana sekolah sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial kepala sekolah, partisipasi masyarakat, serta konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan sekolah.

Tujuan Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya seluruh proses pendidikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai memungkinkan sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran, meningkatkan kompetensi pendidik, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengembangkan berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Fattah (2020) menjelaskan bahwa tujuan utama pembiayaan pendidikan adalah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Selain itu, pembiayaan pendidikan juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. UNESCO (2021) menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, fungsi operasional, yaitu mendukung seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah agar dapat berjalan secara efektif. Kedua, fungsi pengembangan, yaitu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan. Ketiga, fungsi investasi, yaitu membangun fondasi pendidikan jangka panjang melalui pengembangan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Ferdi (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena seluruh program pendidikan memerlukan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik dan lembaga pendidikan.

Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam sistem pendidikan Indonesia, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai pihak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Secara umum, sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari:

1 Pemerintah pusat melalui Dana BOS, DAK Pendidikan, dan berbagai program bantuan pendidikan lainnya.
2 Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3 Masyarakat melalui komite sekolah, sumbangan sukarela, dan partisipasi orang tua peserta didik.
4 Dunia usaha dan dunia industri melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan pendidikan.
5 Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Armando *et al*. (2025) menunjukkan bahwa keberagaman sumber pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan fleksibilitas sekolah dalam memenuhi kebutuhan program pendidikan. Namun demikian, pengelolaan sumber dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara optimal.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi mendukung seluruh aktivitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperkuat oleh kajian Ferdi (2013), pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga jenis utama, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

1. Biaya Investasi. Biaya investasi merupakan biaya yang digunakan untuk penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya ini bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan pendidikan. Contohnya adalah pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan pengadaan teknologi pembelajaran.
2. Biaya Operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan sehari-hari. Biaya ini meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan bahan habis pakai, biaya listrik, air, internet, pemeliharaan sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan operasional sekolah lainnya. Biaya operasional menjadi komponen utama yang menjamin kelancaran proses pembelajaran di sekolah.
3. Biaya Personal. Biaya personal merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik atau orang tua untuk mengikuti proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya tersebut dapat berupa pembelian seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya. Tingginya biaya personal dapat menjadi salah satu hambatan akses pendidikan sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal yang saling mendukung dalam menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Prinsip Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dalam MBS

Pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) agar penggunaan dana pendidikan mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi stakeholder.

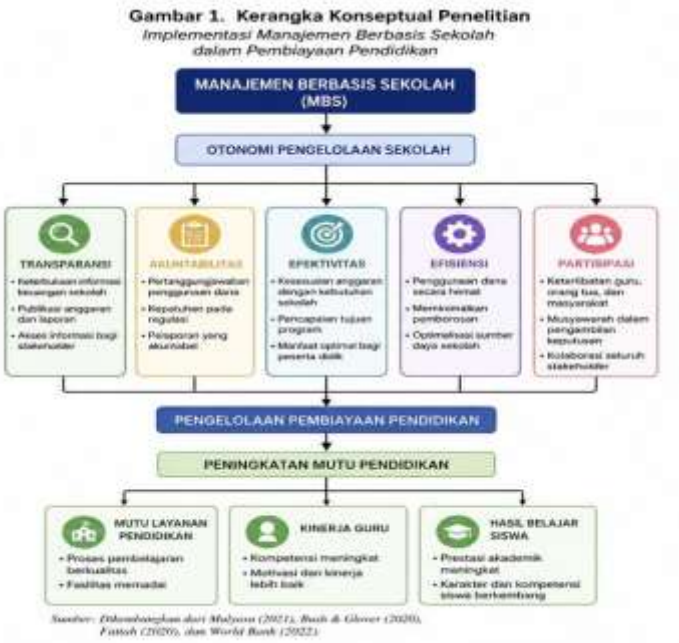
1. Transparansi, merupakan keterbukaan sekolah dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana pendidikan kepada seluruh stakeholder. Keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Akhyar (2024) menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan. Transparansi juga menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik.
2. Akuntabilitas, merupakan kemampuan sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan kepada pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun peserta didik. Setiap penggunaan dana harus sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dan dapat dibuktikan melalui laporan keuangan yang jelas serta dapat diaudit.

Nugroho, Matin, dan Zulaikha (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola sekolah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

3. Efektivitas, menunjukkan tingkat keberhasilan penggunaan dana pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana yang efektif ditandai dengan tercapainya program-program pendidikan sesuai target yang telah direncanakan. Pembiayaan pendidikan yang efektif memungkinkan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan.
4. Efisiensi, merupakan kemampuan sekolah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dana pendidikan harus digunakan secara tepat sasaran dan menghindari pemborosan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan. Efisiensi pengelolaan pembiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi MBS.
5. Partisipasi Stakeholder, merupakan keterlibatan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana pendidikan. Keterlibatan stakeholder dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran sekolah. Penelitian Hasanuddin dan Muhri (2021) menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana pendidikan karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi stakeholder merupakan prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan mewujudkan tata kelola sekolah yang baik.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, implementasi, dan dampak Manajemen Berbasis Sekolah terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 yang terdiri atas tahap identifikasi (identification), penyaringan (screening), kelayakan (eligibility), dan inklusi (inclusion).

Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan pencarian artikel melalui beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, Garuda, ERIC, dan Scopus menggunakan kata kunci "Manajemen Berbasis Sekolah", "School-Based Management", "Pembiayaan Pendidikan", "Education Financing", "School Financial Management", dan "Educational Quality". Hasil pencarian awal memperoleh 80 artikel yang relevan dengan topik penelitian.

1. Tahap penyaringan (screening) dilakukan dengan menyeleksi artikel berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang tidak berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah dan pembiayaan pendidikan serta artikel yang terduplikasi dieliminasi dari proses analisis. Pada tahap ini diperoleh 40 artikel yang dinilai relevan.
2. Tahap kelayakan (eligibility) dilakukan dengan membaca keseluruhan isi artikel (full text review). Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel membahas Manajemen Berbasis Sekolah dan pembiayaan pendidikan; (2) dipublikasikan pada tahun 2020–2026; (3) tersedia dalam bentuk full text; (4) berasal dari jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; dan (5) memiliki informasi penelitian yang lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 25 artikel yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut.
3. Tahap inklusi (inclusion) menghasilkan 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam proses sintesis literatur. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan mengelompokkan hasil penelitian ke dalam tema-tema utama yang meliputi konsep Manajemen Berbasis Sekolah, prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi MBS dalam pengelolaan keuangan sekolah, dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 1. Proses Seleksi Literatur Menggunakan Metode PRISMA

Berdasarkan Gambar 1, proses identifikasi menghasilkan 80 artikel dari berbagai basis data akademik. Setelah dilakukan penghapusan artikel duplikat dan penyaringan berdasarkan judul serta abstrak, diperoleh 40 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan evaluasi kelayakan terhadap 25 artikel melalui proses *full text review*. Berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 artikel dipilih dan digunakan sebagai sumber utama dalam analisis Systematic Literature Review.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian diperoleh melalui analisis berbagai literatur yang membahas implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sintesis hasil penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penelitian Relevan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Nugroho, Matin, & Zulaikha (2022)	*The School Principles' Accountability in Management of Education Financing*	Studi Kasus Kualitatif	Akuntabilitas pembiayaan pendidikan ditentukan oleh transparansi, kinerja kepala sekolah, dan kemitraan dengan komite sekolah.
2	Husnidar, Khairuddin, & Bahrun (2024)	*Implementation of Education Financing Management in Improving the Quality of Learning*	Kualitatif	Pengelolaan pembiayaan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas mampu meningkatkan mutu pembelajaran.
3	Armando et al. (2025)	*School-Based Management (SBM) in Supporting Education Financial Management*	Deskriptif Kualitatif	MBS mendukung pengelolaan keuangan sekolah yang efektif melalui partisipasi stakeholder, transparansi, dan efisiensi anggaran.
4	Zaini (2025)	*Effectiveness of Education Financing Management in Public and Private Schools*	Studi Kasus Kualitatif	Efektivitas pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh perencanaan, alokasi, dan mekanisme akuntabilitas keuangan sekolah.
5	Akhyar (2024)	*Public Accountability in*	Survei	Akuntabilitas publik menjadi faktor penting dalam

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		Financial Management Practice at Islamic Education Institutions		mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang baik.
6	Male (2026)	*Financing Management in Private Junior High Schools*	Systematic Literature Review	Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi prinsip utama pengelolaan pembiayaan pendidikan.
7	Anita et al. (2024)	*Implementation of Performance-Based Financing Management*	Studi Kasus Kualitatif	Pendekatan pembiayaan berbasis kinerja meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan.
8	Maulina (2026)	*Education Financing as a Strategic Component of School Quality*	Kajian Literatur	Pembiayaan pendidikan berkontribusi terhadap keberlanjutan program sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran.
9	Muslihah (2018)	*School Based Management: Concept Development and Its Implementation in Indonesia*	Kajian Konseptual	MBS memberikan otonomi kepada sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan.
10	Yasin & Mokhtar (2022)	*Practices of Accountability and Transparency in Financial Management among School Principals*	Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sekolah.

Berdasarkan sepuluh penelitian tersebut, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas pembiayaan pendidikan, dan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah secara parsial. Penelitian Nugroho et al. (2022) lebih menekankan akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, sedangkan Husnidar et al. (2024) dan Zaini (2025) berfokus pada efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan. Sementara itu, Armando et al. (2025) mengkaji peran MBS dalam mendukung pengelolaan keuangan sekolah.

Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan secara komprehensif konsep Manajemen Berbasis Sekolah, prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi pengelolaan keuangan sekolah, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam satu kajian sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menghasilkan sintesis yang lebih menyeluruh mengenai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan

Pembahasan

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, termasuk pembiayaan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Otonomi yang diberikan melalui MBS memungkinkan sekolah mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat dalam perencanaan serta penggunaan anggaran pendidikan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2021) yang menyatakan bahwa MBS merupakan bentuk pemberdayaan sekolah melalui pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Penelitian Muslihah (2018) menunjukkan bahwa implementasi MBS memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Temuan serupa juga ditemukan oleh Armando et al. (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam kerangka MBS sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder, transparansi pengelolaan anggaran, dan kemampuan sekolah dalam menetapkan prioritas program sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, MBS tidak hanya berfungsi sebagai model administrasi pendidikan, tetapi juga sebagai strategi peningkatan mutu melalui penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan sekolah.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dalam MBS

Berdasarkan hasil kajian, terdapat lima prinsip utama yang menjadi dasar pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam MBS, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi stakeholder. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang baik (good governance).

Penelitian Nugroho, Matin, dan Zulaikha (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Hasil penelitian Yasin dan Mokhtar (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan sekolah. Selain itu, penelitian Akhyar (2024) menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang dapat meningkatkan legitimasi sekolah di mata masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada penggunaan dana, tetapi juga pada kemampuan sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada seluruh stakeholder. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi MBS pada aspek pembiayaan pendidikan.

Implementasi MBS dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Hasil sintesis menunjukkan bahwa implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun program dan anggaran berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi melalui musyawarah dengan stakeholder sekolah. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan penggunaan dana menjadi lebih tepat sasaran.

Penelitian Husnidar, Khairuddin, dan Bahrun (2024) menemukan bahwa pengelolaan pembiayaan yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sementara itu, Zaini (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan sekolah. Perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi terhadap implementasi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penggunaan sistem informasi keuangan dan aplikasi digital membantu sekolah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelaporan keuangan, dan memperkuat transparansi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, implementasi MBS pada era digital tidak hanya menekankan aspek partisipatif, tetapi juga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah.

Dampak Penerapan MBS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi MBS dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan sekolah mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana, serta berbagai program peningkatan mutu lainnya.

Penelitian Maulina (2026) menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis yang menentukan keberhasilan program sekolah. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nurlaya (2020) yang menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah dan kualitas pembelajaran. Meskipun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki sekolah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pembiayaan yang diterapkan. Dana yang besar tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan secara profesional dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip MBS memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik sekolah sehingga mampu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, kualitas pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MBS dipengaruhi oleh kompetensi manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber daya, dukungan stakeholder, dan efektivitas sistem pengawasan keuangan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, MBS terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pembiayaan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta sinergi yang berkelanjutan antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat guna mendukung tercapainya mutu pendidikan yang unggul, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, Y. (2024). Public accountability in financial management practice at Islamic educational institutions. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 16*(1), 1–12.

Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19*(4), 565–578. https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310

Fattah, N. (2020). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.

Gusnardi, G., Riadi, R. M., & Hendripides, H. (2021). School financial management based on accountability and transparency. *International Journal of Early Childhood Special Education, 13*(2), 538–550.

Hasanuddin, A. N. T., & Muhri, A. (2021). The effect of accountability, transparency and stakeholder participation on the effectiveness of the management of school operational assistance (BOS). *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3867506

Husnidar, H., Khairuddin, K., & Bahrun, B. (2024). Implementation of education financing management in improving the quality of learning. *Journal of Educational Management and Learning*.

Male, M. (2026). Financing management in private junior high schools. *Review of Islamic Education Management Journal*.

Mulyasa, E. (2021). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.

Muslihah, S. (2018). School based management: Concept development and its implementation in Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Pendidikan,* 3(2), 85–96.

Nugroho, K. J., Matin, M., & Zulaikha, S. (2022). The school principals' accountability in management of education financing. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14*(2), 1807–1818.

Nurlaya, N. (2020). Pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 12*(1), 45–56.

OECD. (2021). *Education at a glance 2021: OECD indicators*. OECD Publishing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Radiansyah, A. N. (2026). The relationship between school based management and educational quality. *Journal of Educational Management Studies*.

Simamora, B. (2022). Effectiveness of financial management in schools at educational institutions. *Attractive: Innovative Education Journal, 4*(3), 531–537.

Sinaga, P. R. (2025). Manajemen berbasis sekolah sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

World Bank. (2022). *Education finance watch 2022*. World Bank.

Yasin, M., & Mokhtar, M. (2022). Practices of accountability and transparency in financial management among school principals. *Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan, 39*(2), 25–39.

Zaini, Z. A. H. (2025). Effectiveness of education financing management in public and private schools: Policy perspective and implementation. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 17*(2).